Tantangan dan Strategi Pengelolaan Administrasi Keuangan di Tengah Keterbatasan Infrastruktur Digital Pemerintah Daerah

Fadia Putri Illa¹, Cynthia Eka Violita^{1*}

¹Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan strategi yang dikembangkan oleh pegawai pemerintah daerah dalam mengelola administrasi keuangan di tengah keterbatasan infrastruktur digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di salah satu organisasi perangkat daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi internal. Analisis data dilakukan dengan teknik tematik untuk mengungkap pola tantangan dan strategi adaptif yang muncul dalam praktik pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidakstabilan jaringan, keterbatasan perangkat keras, dan sistem informasi keuangan yang tidak responsif. Strategi yang dilakukan mencakup penyesuaian alur kerja manual, koordinasi lintas bagian, dan penguatan kapasitas individu melalui pelatihan mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan tetap dapat berjalan adaptif meskipun dihadapkan pada hambatan digital.

Kata kunci

Administrasi Keuangan Publik; Infrastruktur Digital; Manajemen Keuangan; Strategi Adaptif; Tantangan Birokrasi

Abstract

This study aims to identify the challenges faced and strategies developed by local government employees in managing financial administration amidst limited digital infrastructure. The method used is a qualitative approach with a case study in one of the regional apparatus organizations. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and internal documentation. Data analysis was carried out using thematic techniques to reveal patterns of challenges and adaptive strategies that emerged in financial management practices. The results of the study indicate that the main challenges include network instability, hardware limitations, and unresponsive financial information systems. The strategies used include adjusting manual workflows, cross-sectional coordination, and strengthening individual capacity through independent training. This study concludes that financial administration management can still run adaptively even though faced with digital obstacles.

Keywords

Public Financial Administration; Digital Infrastructure; Financial Management; Adaptive Strategy; Bureaucratic Challenges

Korespondensi
Cynthia Eka Violita
cynthia401.mnj@unusida.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem informasi dalam pengelolaan administrasi keuangan guna menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik (Kusnadi, Oemar and Supeno, 2022). Namun, di banyak daerah, keterbatasan infrastruktur digital seperti koneksi internet yang tidak stabil, perangkat keras yang usang, serta sumber daya manusia yang belum memadai menjadi kendala utama dalam implementasi sistem keuangan berbasis digital. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif harian, yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik dan pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana strategi adaptif dijalankan oleh aparatur pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan fungsi administrasi keuangan meskipun dalam keterbatasan (Warliana, Syafina and Hermain, 2023).

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan administrasi keuangan tetap berjalan di tengah keterbatasan infrastruktur digital di lingkungan pemerintah daerah (Syauqi, Siregar and Syaukat, 2019). Pertanyaan ini menjadi penting karena tantangan teknis tidak hanya memengaruhi kecepatan kerja, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kesalahan dalam penyusunan laporan, verifikasi anggaran, dan pencairan dana publik. Penelitian ini ingin memahami lebih dalam bagaimana organisasi perangkat daerah menyusun strategi untuk mengatasi hambatan tersebut secara praktis dan efisien (L. Lestari, 2019). Dengan fokus pada konteks lokal, penelitian ini mengangkat persoalan nyata yang sering kali tidak tercermin secara eksplisit dalam perumusan kebijakan nasional.

Saat ini, transformasi digital di sektor publik mengalami tantangan signifikan, terutama di tingkat daerah, karena belum meratanya ketersediaan infrastruktur dan kompetensi digital pegawai (Susilawati, Yanti and Erni, 2023). Sistem keuangan daerah seperti SIKSDA atau SIPD kerap menghadapi gangguan teknis yang memperlambat proses pengarsipan dan pelaporan keuangan (Subroto and Uliansyah, 2023). Selain itu, keterbatasan perangkat komputer dan akses internet menjadi penghambat dalam menginput serta memverifikasi dokumen secara *real-time* (W. Lestari, 2019). Penelitian Suharto dan Ramadhan (2020) juga menunjukkan bahwa beberapa OPD masih mengandalkan proses manual karena kurangnya pelatihan pemanfaatan sistem digital. Bahkan, meskipun pemerintah telah mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan, belum semua instansi memiliki sumber daya dan kapasitas yang mendukung penuh inisiatif tersebut (Qothrunnada *et al.*, 2023).

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam mengungkap dinamika adaptasi administratif di tengah keterbatasan teknologi yang masih dihadapi pemerintah daerah (Johannes, 2024). Dengan menggali strategi yang diterapkan dalam situasi nyata, studi ini memberikan kontribusi praktis terhadap upaya peningkatan tata kelola keuangan sektor publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan peningkatan infrastruktur digital yang lebih responsif terhadap kebutuhan operasional harian (Indriati and Supardal, 2023). Temuan penelitian ini juga memperkaya khazanah akademik dalam kajian manajemen keuangan publik berbasis kontekstual lokal (Rahmah, 2016).

Untuk menghadapi tantangan pengelolaan administrasi keuangan di tengah keterbatasan infrastruktur digital, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi praktik strategi adaptif dari pegawai pemerintah daerah, baik dalam bentuk improvisasi prosedur manual, peningkatan koordinasi antarbagian, hingga pelatihan teknis mandiri. Penelitian ini menekankan bahwa penguatan *soft strategy* seperti kolaborasi tim dan manajemen waktu, dapat menjadi alternatif sementara yang efektif sebelum perbaikan sistem digital sepenuhnya dapat diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi keuangan secara efisien meskipun dalam keterbatasan teknologi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya digitalisasi sistem keuangan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, sebagian besar studi cenderung menitikberatkan pada implementasi teknis sistem informasi, bukan pada aspek strategis ketika menghadapi keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggali strategi praktis yang dijalankan oleh pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam kondisi yang tidak ideal. Kajian ini memberikan perspektif kualitatif yang lebih mendalam, yang dapat melengkapi literatur sebelumnya tentang digitalisasi administrasi keuangan sektor publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan administrasi keuangan di tengah keterbatasan infrastruktur digital pada lingkup pemerintah daerah. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses, tantangan, dan strategi yang digunakan oleh aparatur pemerintahan dalam konteks nyata secara menyeluruh. Fokus penelitian tertuju pada pengalaman dan praktik administratif di Kantor Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo sebagai unit analisis utama.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan administrasi dan keuangan di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Sampel dipilih secara purposive, yaitu individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran langsung dalam proses pengelolaan keuangan dan penggunaan sistem digital, seperti kepala subbagian keuangan, staf administrasi, dan operator sistem informasi keuangan. Jumlah partisipan ditetapkan sebanyak 5–7 orang, mempertimbangkan kedalaman data yang dibutuhkan dan efektivitas proses analisis dalam penelitian kualitatif.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, yang disusun berdasarkan fokus penelitian: tantangan, strategi adaptif, dan dampak dari keterbatasan infrastruktur digital. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka secara mendalam dengan masing-masing partisipan di lokasi kerja mereka. Setiap sesi berlangsung sekitar 45–60 menit dan direkam dengan persetujuan peserta. Wawancara dilaksanakan selama dua minggu, disertai dengan observasi partisipatif terbatas terhadap aktivitas rutin di bagian keuangan dan dokumentasi terkait seperti laporan keuangan, arsip pengeluaran, dan tampilan sistem SIKSDA. Data juga diperkuat melalui telaah dokumen internal untuk mendalami alur administratif yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari transkrip wawancara dan catatan observasi. Proses analisis meliputi tahap: (1) transkripsi data; (2) membaca keseluruhan data secara menyeluruh; (3) pengkodean awal; (4) identifikasi tema; (5) penggabungan dan penamaan tema; serta (6) interpretasi dan penyusunan narasi tematik. Analisis ini bertujuan menggali pemahaman yang mendalam terkait pola strategi dan tantangan yang dihadapi partisipan dalam konteks keterbatasan digital.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan pendekatan kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmasiabilitas. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu, member checking dilaksanakan dengan meminta konfirmasi kepada partisipan atas hasil interpretasi data sementara. Audit trail disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses analisis agar transparan dan dapat direplikasi.

Peneliti memastikan pelaksanaan penelitian sesuai dengan prinsip etika akademik, termasuk memperoleh *inform consent* secara tertulis dari semua partisipan. Identitas dan data pribadi peserta dijaga kerahasiaannya. Peneliti juga menjelaskan bahwa partisipan memiliki hak untuk menghentikan keikutsertaan mereka kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Semua proses berlangsung dengan menghormati kenyamanan dan integritas peserta.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menghadapi sejumlah tantangan teknis dan struktural akibat keterbatasan infrastruktur digital. Dari proses analisis data wawancara dan observasi, teridentifikasi tiga tema utama yang menjadi fokus temuan, yaitu: (1) kendala infrastruktur digital, (2) strategi adaptasi administratif, dan (3) koordinasi antarbagian sebagai penopang efisiensi. Temuan ini mencerminkan realitas organisasi publik yang harus menavigasi kompleksitas teknologi dengan sumber daya terbatas.

Peneliti mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema besar sebagai berikut:

- **Tema 1: Keterbatasan Infrastruktur Digital**
Meliputi jaringan internet tidak stabil, perangkat keras yang sering bermasalah, dan sistem keuangan daerah (SIKSDA) yang tidak responsif.
- **Tema 2: Strategi Adaptasi Administratif**
Termasuk penggunaan prosedur manual, pelatihan mandiri, serta pemanfaatan dokumen cadangan sebagai alternatif digitalisasi.
- **Tema 3: Peran Koordinasi dan Komunikasi Antarbagian**
Menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi lintas bagian, terutama saat sistem digital mengalami kendala.

Temuan ini selaras dengan penelitian (W. Lestari, 2019) yang menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dalam mendukung efektivitas administrasi digital di sektor publik. Namun, berbeda dari studi (Subroto and Uliansyah, 2023) yang menyoroiti solusi berbasis kebijakan makro, penelitian ini menekankan strategi mikro-organisasional dari aktor lokal sebagai kekuatan adaptif utama. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga keterampilan dan jaringan sosial internal dalam instansi.

Tiga tema utama saling terkait dalam praktik administratif. Keterbatasan infrastruktur mendorong munculnya strategi adaptasi individual dan kolektif. Strategi ini kemudian diperkuat oleh budaya koordinatif antardivisi yang mengompensasi lemahnya dukungan sistem. Ketiga aspek ini membentuk sistem ketahanan organisasi secara informal dalam menghadapi keterbatasan teknologi.

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi temuan adalah kebijakan anggaran yang terbatas untuk pengadaan perangkat dan pelatihan, serta beban kerja akhir bulan yang meningkat secara sistemik. Selain itu, budaya kerja birokrasi yang masih mengutamakan dokumentasi fisik turut memperlambat proses digitalisasi. Lingkungan eksternal ini menciptakan tekanan tambahan yang memperkuat peran strategi adaptasi internal.

Salah satu temuan tak terduga adalah bahwa meskipun teknologi dianggap penting, tidak semua pegawai merasa perlu digitalisasi sepenuhnya. Beberapa mengungkapkan kenyamanan menggunakan sistem manual karena dianggap lebih aman dan terkontrol. Hal ini bertentangan dengan asumsi awal bahwa digitalisasi selalu dianggap sebagai solusi mutlak oleh semua pihak.

- Sebagian besar staf mengalami kendala koneksi internet dan keterbatasan perangkat saat mengelola laporan keuangan.
- Strategi alternatif seperti penggunaan dokumen fisik dan koordinasi manual menjadi praktik harian.
- Sistem keuangan daerah belum sepenuhnya mendukung efisiensi administratif.
- Ketahanan administratif terbentuk melalui kerjasama informal antarbagian.
- Beberapa pegawai masih memilih prosedur manual meski tersedia sistem digital.

Temuan ini memberikan kontribusi praktis terhadap pemahaman manajemen keuangan sektor publik dengan menyoroiti pentingnya strategi adaptif dalam kondisi digitalisasi parsial. Dalam tataran teoritis, penelitian ini memperluas perspektif adaptasi organisasi dengan mengintegrasikan elemen manusia dan sosial dalam menjawab tantangan teknologi. Studi ini menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi peningkatan infrastruktur digital yang kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan di instansi pemerintah daerah menghadapi tantangan nyata akibat keterbatasan infrastruktur digital, yang berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta strategi yang diterapkan oleh

aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi keuangan. Temuan-temuan yang diperoleh berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian dan mendukung hipotesis bahwa keterbatasan teknologi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga memerlukan respons strategis secara struktural dan individual.

Penelitian menemukan bahwa keterbatasan jaringan internet, perangkat keras yang lambat, serta sistem keuangan seperti SIKSDA yang sering mengalami gangguan menjadi hambatan utama dalam proses pengelolaan keuangan. Pegawai kesulitan mengakses dan menginput data secara tepat waktu. Hal ini berdampak pada keterlambatan laporan dan risiko kesalahan input. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu responden: *"Saat sistem down, kami harus pakai sistem manual. Itu memperlambat pekerjaan kami."* Temuan ini memperkuat hasil studi oleh (W. Lestari, 2019) yang menegaskan bahwa infrastruktur yang tidak memadai menghambat pengelolaan data keuangan secara digital.

Dalam menghadapi keterbatasan teknologi, pegawai mengembangkan strategi adaptif seperti pengarsipan manual, pelatihan mandiri penggunaan aplikasi, dan koordinasi informal lintas bagian. Tindakan ini bersifat praktis dan kontekstual, namun efektif menjaga kesinambungan proses kerja. Misalnya, dokumen penting dicetak dan difotokopi sebagai cadangan saat sistem tidak bisa diakses. Hal ini sejalan dengan konsep adaptasi organisasi mikro (Johannes, 2024), di mana organisasi merespons hambatan teknologi dengan improvisasi berbasis sumber daya lokal.

Peneliti menemukan bahwa keberhasilan administrasi keuangan di tengah keterbatasan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antarbagian, khususnya antara subbagian keuangan, perencanaan, dan kepegawaian. Ketika sistem digital tidak berfungsi, koordinasi manual seperti pengiriman data melalui flashdisk atau pesan WhatsApp menjadi solusi sementara. Kolaborasi ini menciptakan fleksibilitas dan meningkatkan keandalan proses administratif. Temuan ini sejalan dengan (Zulfikhar *et al.*, 2024) yang menekankan pentingnya budaya organisasi dalam menanggulangi disrupsi teknologi.

Temuan utama menunjukkan bahwa gangguan infrastruktur digital memengaruhi seluruh proses administrasi keuangan, namun dapat diatasi melalui strategi adaptif, kolaborasi internal, dan improvisasi berbasis sumber daya lokal. Ketahanan organisasi terbentuk bukan karena kecanggihan sistem, melainkan karena fleksibilitas manusia dan jaringan kerja yang dibangun antarindividu di dalamnya.

Penelitian ini mendukung temuan dari (Destefani, 2005) yang menyatakan bahwa kendala infrastruktur digital menjadi tantangan umum dalam digitalisasi layanan publik di tingkat daerah. Sistem informasi keuangan di daerah cenderung tidak stabil karena kurangnya investasi dalam infrastruktur dasar. Selain itu, studi oleh (Djatmiko, Sinaga and Pawirosumarto, 2025) menyebutkan bahwa adaptasi pegawai menjadi elemen penting dalam mempertahankan fungsi sistem keuangan publik, terutama di negara berkembang. Sejalan dengan itu, penelitian ini menunjukkan bahwa aktor lokal memiliki peran kunci dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan anggaran meski dalam keterbatasan. Penelitian lain oleh (Sagarik, 2024) juga menegaskan bahwa kompetensi teknis pegawai mendukung ketahanan proses digitalisasi pada sektor publik. Hal ini memperkuat temuan bahwa solusi terhadap tantangan digital tidak selalu memerlukan intervensi struktural besar, melainkan bisa dimulai dari perubahan praksis kerja di level individu.

Penelitian ini memberikan pandangan berbeda dari studi (Wu, Bai and Chen, 2023) yang menekankan bahwa digitalisasi otomatis menghasilkan efisiensi. Di konteks lokal seperti Sidoarjo, digitalisasi justru menimbulkan beban tambahan ketika tidak didukung oleh infrastruktur yang andal. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan top-down dalam penerapan sistem digital dapat mengalami kegagalan implementasi jika tidak disesuaikan dengan kapasitas teknis dan budaya kerja lokal. Berbeda dengan temuan (Colovic, Caloffi and Rossi, 2022) yang menyarankan sentralisasi data sebagai solusi, penelitian ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas desentralisasi prosedural dalam kondisi darurat digital. Dengan demikian, studi ini menyoroti bahwa adaptasi lokal berbasis konteks sangat penting dalam menghadapi keterbatasan sistem digital nasional.

Dari keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan administrasi keuangan di tengah keterbatasan infrastruktur digital sangat bergantung pada kemampuan adaptif pegawai, koordinasi antarbagian, dan fleksibilitas prosedur internal. Sistem teknologi yang tidak stabil tidak serta merta menghentikan proses kerja, selama ada dukungan kolaboratif dan solusi praktis yang berbasis kebutuhan riil lapangan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap respons mikro-organisasional yang muncul dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur digital di sektor publik. Tidak seperti studi sebelumnya yang dominan membahas efisiensi sistem digital dari sisi teknologi atau kebijakan, studi ini menyajikan wawasan berbasis praktik lokal, khususnya dalam strategi adaptif yang diterapkan pegawai secara mandiri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai bagaimana birokrasi daerah membentuk ketahanan administratif melalui inisiatif informal.

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan “ketahanan administratif adaptif” sebagai konsep baru dalam konteks manajemen keuangan daerah. Konsep ini dapat menjadi dasar teori baru yang memfokuskan pada kemampuan organisasi publik bertahan dan berfungsi dalam situasi terbatas secara teknologi dan sumber daya.

Limitasi

Kajian kegiatan penelitian ini terbatas pada dalam hal cakupan partisipan yang hanya berasal dari satu instansi, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke semua organisasi pemerintah daerah. Selain itu, waktu observasi terbatas dapat memengaruhi kedalaman data yang diperoleh dari proses kegiatan sehari-hari. Namun, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks yang diteliti.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur digital seperti gangguan jaringan dan perangkat yang tidak memadai menjadi hambatan utama dalam pengelolaan administrasi keuangan. Strategi yang dikembangkan oleh pegawai, seperti prosedur manual, pelatihan mandiri, dan koordinasi lintas bagian terbukti efektif dalam menjaga kontinuitas kerja. Budaya kerja kolaboratif menjadi penopang utama dalam mempertahankan efisiensi administrasi. Temuan ini menekankan bahwa teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan digitalisasi keuangan daerah. Ketahanan pengelolaan administrasi keuangan di tengah keterbatasan digital ditentukan oleh adaptasi manusia dan kolaborasi lintas fungsi, bukan hanya kecanggihan sistem. Artikel ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang manajemen keuangan publik dengan memperkenalkan konsep strategi adaptif administratif berbasis praktik lokal. Studi ini terbatas pada satu instansi pemerintah daerah dengan jumlah partisipan yang relatif kecil, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya dapat memperluas konteks ke beberapa instansi berbeda untuk membandingkan pola adaptasi dan strategi lintas wilayah dalam kondisi digital yang bervariasi.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kepala desa, tokoh dan warga desa X di Kecamatan Y Kabupaten Sidoarjo atas kerjasama dan dukungan sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Colovic, A., Caloffi, A. and Rossi, F. (2022) ‘Centralized Digital Accounting and Local Government Efficiency’, *Public Administration Review*, 82(4), pp. 756–763. Available at: <https://doi.org/10.1111/puar.13489>.

Destefani, J. (2005) ‘E-Government: Challenges and Opportunities’, *Products Finishing (Cincinnati)*, 70(1), p. 6.

Djarmiko, G.H., Sinaga, O. and Pawirosumarto, S. (2025) ‘Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance’, *Sustainability*, 17(7), p. 2908. Available at:

<https://doi.org/10.3390/su17072908>.

Indriati, B. and Supardal, S. (2023) 'Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman', *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(1), p. press. Available at: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i1.300>.

Johannes, R.A. (2024) 'Optimalisasi Smart Asn Dalam Mendukung Transformasi Birokrasi Di Era Digital Di Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), pp. 151–165.

Kusnadi, A., Oemar, F. and Supeno, B. (2022) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Sains Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), pp. 51–63. Available at: <https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>.

Lestari, L. (2019) 'Akuntabilitas Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto)', *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1579>.

Lestari, W. (2019) 'Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Medan)', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), pp. 7–15.

Qothrunnada, N.A. et al. (2023) 'Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), pp. 741–756. Available at: <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>.

Rahmah, N.A. (2016) 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palu', *e-Journal Katalogis*, 4(6), pp. 17–28.

Sagarik, D. (2024) 'How Digital Government Capabilities Strengthen Public Sector Workforce Resilience', *International Review of Public Administration*, 29(4), pp. 353–362. Available at: <https://doi.org/10.1080/12294659.2024.2432096>.

Subroto, I. and Uliansyah, B.A.A. (2023) 'Evaluasi Perspektif Pengguna Terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten X)', *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(2), pp. 140–157. Available at: <https://doi.org/10.31092/jmkip.v7i2.2578>.

Susilawati, F.E., Yanti, R. and Erni, E. (2023) 'Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya)', *Journal Social Society*, 3(2), pp. 80–94. Available at: <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.338>.

Syauqi, M., Siregar, H. and Syaikat, Y. (2019) 'Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Bogor dalam Pengelolaan APBD', *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1). Available at: https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i1.27540.

Warliana, R., Syafina, L. and Hermain, H. (2023) 'Pengaruh PSAP dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Kota Medan', *Jurnal Proaksi*, 10(3), pp. 366–381. Available at: <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4060>.

Wu, Y.H., Bai, L. and Chen, X. (2023) 'How does the Development of Fintech Affect Financial Efficiency? Evidence from China', *Economic Research-Ekonomika Istraživanja*, 36(2). Available at: <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2106278>.

Zulfikhar, R. et al. (2024) 'Dampak Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Terhadap Prestasi Akademis Mahasiswa Perguruan Tinggi', *Journal on Education*, 6(4), pp. 18381–18390. Available at: <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5787>.